

HUBUNGAN ANTARA KUALITAS KELEMBAGAAN, INVESTASI ASING LANGSUNG, KEBEBASAN PASAR, DAN KEWIRAUSAHAAN: STUDI PERBANDINGAN DI ASIA TENGGARA

Sugeng Hariadi

Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Surabaya

E-mail: ssihar@gmail.com

Abstract – Entrepreneurship is one of the important factors in improving a country's competitiveness index. Studies on the relationship between entrepreneurship (business creation) and macro factors that influenced are still not widely applied. The purpose of this study is to measure how the institutional quality, foreign direct investment, and economic freedom, interact to encourage entrepreneurship. This study uses the data of five Southeast Asian countries for the period 2004-2012. Data sourced from The World Bank Entrepreneurship Snapshots. Linear model constructed was estimated by ordinary least squares method. Study findings indicate that there is variation in the growth of entrepreneurship with different challenges for each country. Institutional quality becomes a significant factor in influencing the growth of entrepreneurship in the five countries which are the object of study. FDI also has a positive effect on entrepreneurship in most countries of the object of study. Finally, the freedom of the market has little effect on the increase in business creation.

Kata Kunci: kewirausahaan, kualitas kelembagaan, FDI, kebebasan pasar

I. PENDAHULUAN

Indeks daya saing Indonesia naik 12 peringkat pada 2013. *World Economic Forum* (WEF) dalam *The Global Competitiveness Report* 2013-2014, menempatkan Indonesia di peringkat 38 dari 148 negara, sedang pada 2012-2013 Indonesia menempati posisi 50.

Meski demikian, jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, Indonesia masih menempati peringkat kelima. Empat negara yang berada di atas Indonesia adalah Singapura (urutan 2), Malaysia (24), Brunei Darussalam (26), dan Thailand (37). Enam negara lainnya yang berada di bawah Indonesia adalah Filipina (urutan 59),

Vietnam (70), Laos (81), Kamboja (88), dan Myanmar (139).

Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa faktor yang paling bermasalah untuk melakukan bisnis di Indonesia adalah korupsi, birokrasi pemerintah yang tidak efisien, dan lemahnya infrastruktur.

Ada keterkaitan erat antara indeks daya saing dan kewirausahaan (*business creation*). *Chief Advisor* WEF, Profesor Xavier Salai Martin, pernah memberikan beberapa rekomendasi konkret yang penting bagi Indonesia untuk meningkatkan indeks daya saing, di antaranya adalah upaya diversifikasi dari sektor yang berbasis sumber daya alam (*natural resources*), modernisasi sektor pemerintahan dan swasta, modernisasi pendidikan, termasuk cara belajar-mengajar bukan hanya di sekolah, tetapi juga di rumah, dan inovasi serta kewirausahaan (Malau, 2010).

Oleh karena itu, penjelasan tentang faktor pendorong kewirausahaan perlu diupayakan. Beberapa studi berusaha mengaitkan hubungan langsung antara kewirausahaan dan faktor kelembagaan dengan menguji kualitas kelembagaan sebagai pertimbangan wirausahawan untuk membuat bisnis (Aidis, et al, 2008; Spencer & Gómez, 2004; Desai, et al, 2003). Studi-studi lain berupaya mencari hubungan antara kewirausahaan dan kebebasan pasar (termasuk kebebasan untuk berdagang dan berinvestasi). Meskipun demikian, hasil-hasil

studi yang ada masih belum dapat meyakinkan dan memungkinkan untuk membuat konsensus tentang pengaruh faktor kebebasan pasar dalam merangsang kewirausahaan (Herrera-Echeverri, et al, 2014). Kewirausahaan juga telah dikaitkan dengan kehadiran investasi asing langsung (*foreign direct investment* atau FDI) dalam studi-studi yang dilakukan di beberapa negara Amerika dan Eropa (baca: Barbosa dan Eiriz, 2009; De Backer dan Sleuwaegen, 2003; Konings, 2001; Aitken dan Harrison, 1999). Diharapkan temuan studi ini akan melengkapi dan menuju konklusi atas hubungan antara ketiga faktor tersebut dan kewirausahaan.

Dengan memperhatikan berbagai keterbatasan, studi ini menggunakan data 2004-2012 untuk 5 negara ASEAN: Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura, dan Thailand. Registri perusahaan baru dari "*the World Bank of Entrepreneurship Snapshots*" dimanfaatkan sebagai *proxy* kewirausahaan (*business creation*) yang selanjutnya dicari dan diuji hubungannya dengan kualitas kelembagaan, kebebasan pasar, dan investasi langsung asing (*Foreign Direct Investment / FDI*) dengan analisis komparatif di negara-negara tersebut.

Studi ini bertujuan, pertama, menganalisis hubungan antara kewirausahaan dan kekuatan kelembagaan di beberapa negara. Kedua, mengevaluasi hubungan antara kewirausahaan dan pasar bebas.

Ketiga, mengkaji dampak dari FDI dalam membantu pengembangan bisnis, khususnya kewirausahaan di negara tuan rumah. Keempat, melihat interaksi antara kualitas kelembagaan, kebebasan pasar, dan FDI dalam meletakkan dasar pengembangan bisnis, khususnya kewirausahaan di suatu negara.

II. LANDASAN TEORI

Wirausaha dari segi etimologi berasal dari kata *wira* dan *usaha*. Wira, berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Usaha, berarti perbuatan amal atau berbuat sesuatu. Sedangkan wirausahawan menurut Schumpeter (1939) adalah seorang inovator yang mengimplementasikan perubahan di dalam pasar melalui kombinasi-kombinasi baru. Kombinasi baru tersebut bisa dalam bentuk: memperkenalkan produk baru, memperkenalkan metode produksi baru, membuka pasar yang baru (*new market*), memperoleh sumber pasokan baru dari bahan atau komponen baru, atau menjalankan organisasi baru pada suatu industri.

Zimmerer dan Scarborough (1996) mendefinisikan: *An entrepreneur is one who creates a new business in the face of risk and uncertainty for the purpose of achieving profit and growth by identifying opportunities and assembling the necessary*

resources to capitalize on those opportunities.

Jadi kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang berbeda dengan mengabdikan seluruh waktu dan tenaga disertai dengan menanggung resiko keuangan, kejiwaan, sosial, dan menerima balas jasa dalam bentuk uang dan kepuasan pribadi.

Studi ini akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kewirausahaan dalam perspektif ekonomi makro. Untuk itu perlu bangunan teori / konsep untuk menjelaskan hubungan antara kewirausahaan (*business creation*) dan kualitas kelembagaan, kebebasan pasar, dan investasi langsung asing (*Foreign Direct Investment / FDI*).

2.1. Kewirausahaan dan Kualitas Kelembagaan

Dampak kualitas kelembagaan ketika memulai usaha perlu diukur untuk menunjukkan pengaruh keberadaan perlindungan hak milik, kualitas pelayanan hukum, penegakan hukum, dan pengendalian korupsi terhadap wirausahawan.

Beberapa studi menunjukkan hubungan antara hak milik dan penciptaan bisnis, yakni temuan bahwa perlindungan hak milik akan meningkatkan pembangunan ekonomi (baca: Svensson, 1998 dan Mauro, 1995) dan menggairahkan inovasi (Broberg et al, 2013).

Perlindungan hak milik yang kuat menjadi signifikan sebagai pertimbangan manfaat dari sebuah bisnis, berikutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, telah ditunjukkan bahwa perlindungan hak kekayaan yang lemah akan meningkatkan persepsi risiko menjadi pengusaha, menghalangi orang untuk memulai sebuah bisnis, dan mengurangi keterlibatan dalam proyek-proyek pembangunan masa depan (Parker, 2007; Claessens dan Laeven, 2003; Demirgüç-Kunt dan Maksimovic, 1998; serta La Porta, et al, 1997).

Perlindungan hak milik juga merupakan dasar proses kewirausahaan karena memungkinkan pengusaha untuk menikmati hasil kerja yang telah dilakukan (Hodler, 2009).

Para peneliti menunjukkan bagaimana kewirausahaan gagal untuk berkembang karena tidak memadainya kualitas hukum, lemahnya penegakan hukum, dan tingginya tingkat korupsi.

Fenomena ini merugikan aktivitas kewirausahaan, *pertama*, ketika kualitas penegakan hukum rendah dan korupsi merajalela, para pengusaha memerlukan dukungan politik yang sangat penting untuk kelangsungan hidup dan pengembangan usaha. Akibatnya, tidak ada insentif untuk menjadi seorang wirausahawan yang jujur dan tidak terlibat urusan korupsi (baca: Aidt, 2009; Aidis, et al, 2008; dan Adachi, 2007;).

Kedua, lingkungan yang mendorong orang-orang menjadi tidak mengutamakan loyalitas dan kejujuran (Aidis & Mickiewicz, 2006; Barkhatova, 2000). *Ketiga*, saat penegakan hukum tersendat-sendat di tengah banyaknya korupsi, akan bisa mencemari pengalaman kewirausahaan (Hodler, 2009; Glaeser, et al, 2003) dan, pada *akhirnya*, memunculkan pandangan bahwa aktivitas kewirausahaan hanya akan merugikan (Aidis, et al, 2010).

Selanjutnya, ruang lingkup kegiatan kewirausahaan dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap para pemangku kepentingan yang ada di lembaga terkait dan tingkat keinginannya untuk mematuhi hukum. Aparat kepolisian, lembaga peradilan, dan pemerintah dituntut memberlakukan undang-undang yang membantu sektor swasta dalam mengembangkan dan menciptakan kondisi yang menghormati setiap kontrak dan tidak menoleransi korupsi.

2.2. Kewirausahaan dan Investasi Asing Langsung (FDI)

Beberapa studi menunjukkan bahwa pengusaha mendapatkan keuntungan dari kehadiran dana FDI melalui tiga cara utama. *Pertama*, di negara-negara berkembang, sumber-sumber keuangan asing akan mengisi kesenjangan modal untuk membiayai ide-ide inovatif berisiko. Hal ini disebabkan para investor asing berusaha mengejar keuntungan

yang lebih besar meskipun sekaligus menanggung risiko yang juga lebih besar (White & Fan, 2006).

Kedua, Alfaro, et al (2009) serta Alfaro dan Charlton (2008) telah menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dan kewirausahaan berkembang ketika ada investasi keuangan internasional dalam industri yang memiliki ketergantungan lebih besar pada investasi keuangan asing.

Faktor ketiga disebut sebagai fenomena *spillover*, yang telah diidentifikasi oleh beberapa peneliti (Ayyagari dan Kosovo, 2010; Acs, et al, 2009; Gorg dan Strobl, 2002). Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa FDI dapat memiliki efek eksponensial merangsang masuknya beberapa bisnis dalam industri yang sama ("*spillovers* horisontal") dan dalam industri terkait atas dan ke bawah dalam rantai produksi yang sama ("*spillovers* vertikal").

Penelitian selanjutnya mengklaim bahwa FDI dapat mempercepat hadirnya seorang pengusaha. Beberapa penelitian (Aitken dan Harrison, 1999 di Venezuela, dan Konings, 2001 di Bulgaria, Rumania, dan Polandia) menyimpulkan bahwa, pada kondisi terbaik, dampak positif dari FDI minimal dan manfaat terbatas pada perusahaan-perusahaan yang memiliki investasi asing tertinggi dan ketergantungan.

Barbosa dan Eiriz (2009) menunjukkan bahwa dalam kasus Portugal dampak FDI pada awalnya adalah positif,

tetapi dalam jangka panjang memiliki dampak negatif dalam penciptaan bisnis. Akhirnya, De Backer dan Sleuwaegen (2003) menemukan bahwa, di Belgia, kehadiran FDI membuat pengusaha baru enggan untuk mendirikan bisnis dan bahkan mempercepat kematian yang sudah ada. Namun, hasilnya bisa tidak separah itu atau bahkan bisa membantu jika perusahaan lokal dan asing dapat saling belajar dari pengalaman.

2.3. Kewirausahaan dan Kebebasan Pasar

Pasar bebas dianggap sebagai prinsip hukum, politik, konstitusional, dan ekonomi yang paling mungkin untuk mendorong kewirausahaan (Kirzner, 1992). Studi di negara-negara berkembang mengkonfirmasi bahwa liberalisasi akan meningkatkan iklim bisnis (Okoroafo, 1993). Dalam ekonomi pasar bebas, penawaran dan permintaan menentukan produksi setiap barang dan jasa serta harga jualnya.

Meskipun pasar yang sepenuhnya bebas adalah tidak ada, tingkat kebebasan dapat diukur melalui referensi mekanisme intervensi yang ada. Intervensi paling umum adalah: kontrol harga, pajak, tarif impor dan ekspor, pengendalian moneter, subsidi, dan monopoli oleh negara.

2.3.1. Kebebasan untuk memulai bisnis

Para peneliti menganjurkan salah satu dari dua pandangan tentang bagaimana hubungan antara kewirausahaan dan

kerangka peraturan operasional dalam praktek. Keyakinan pertama berpendapat bahwa perlu tindakan pengontrolan ketat melalui peraturan untuk menghambat kekacauan yang akan merusak kepercayaan di pasar. Dengan demikian akan melahirkan kewirausahaan (baca: DiTella dan McCulloch, 2006; Djankov, et al, 2003; Glaeser dan Shleifer, 2003).

Argumen kebalikannya adalah bahwa terlalu ketatnya sistem regulasi akan mempertinggi birokrasi, membuka jalan untuk korupsi, dan menghambat penciptaan bisnis baru, dan perluasan yang sudah ada. Beberapa studi mengkonfirmasi gagasan bahwa regulasi mengganggu bisnis pemula (Stigler, 1971) dan bahkan regulator sendiri (Shleifer dan Vishny, 1998; Krueger, 1974).

Djankov, et al (2002) menegaskan bahwa di negara-negara dengan peraturan yang menghambat masuknya bisnis baru, terjadi korupsi yang lebih tinggi. Desai, et al (2003), Klapper, et al (2006), dan Parker (2007) telah menemukan bahwa industri yang umumnya menarik bagi pengusaha untuk masuk akan menjadi kurang diminati di negara-negara dengan sistem yang lebih birokratis dan biaya peraturan yang lebih tinggi.

2.3.2. Kebebasan fiskal

McMullen, et al (2008) menemukan bahwa kenaikan pajak berdampak langsung terhadap aktivitas kewirausahaan, seperti

risiko potensial dalam mendirikan sebuah bisnis dan sebagai hambatan lanjutan.

Struktur pajak yang kompleks mencegah kegiatan kewirausahaan bahkan bagi yang tidak mau mengambil resiko karena akhirnya akan merasakan efek dari kenaikan pajak terus menerus (Gentry dan Hubbard, 2000; Kanbur, 1980). Akan tetapi, Cullen dan Gordon (2002), Gordon (1998), serta Feldstein dan Slemrod (1980), menggarisbawahi bahwa sistem fiskal yang kompleks dan hubungan timbal baliknya tidak dapat dengan mudah diprediksi; dan untuk alasan itu, hubungan antara kebebasan fiskal dan kewirausahaan dapat bervariasi bergantung pada faktor-faktor yang ada seperti pajak keuntungan modal, pajak penghasilan, dan pajak perusahaan.

2.3.3. Kebebasan perdagangan internasional

Beberapa penelitian menyebutkan bagaimana pasar internasional menguntungkan perusahaan besar sementara perusahaan yang lebih kecil dirugikan oleh biaya tetap, pengetahuan yang terbatas tentang pasar internasional, dan keterampilan yang terbatas, serta kemampuan bernegosiasi dengan pemerintah lain yang juga masih terbatas (Gomez- Casseres, 1997; Vernon, 1970).

Ditemukan juga bahwa kompetisi internasional yang makin intensif telah menginduksi banyak perusahaan untuk

mencari perlindungan pemerintah, meski tekanan untuk menggunakan langkah-langkah proteksionis dapat mengakibatkan kerugian kesejahteraan (Zhou dan Vertinsky, 2002).

Penelitian lain menyatakan bahwa penciptaan bisnis dan perdagangan bebas internasional menciptakan hubungan simbiosis (Sobel, et al, 2007; Bartlett dan Ghoshal, 1999). Tesis Bank Dunia (*World Bank*, 2005) menunjukkan bahwa proteksi dalam perdagangan internasional menghambat spesialisasi perdagangan dan partisipasi pasar bebas, mendukung produk yang terkenal dibandingkan yang berinovasi, dan membatasi aktivitas kewirausahaan.

2.3.4. Kebebasan berinvestasi

Pentingnya sumber modal sebagai prasyarat untuk memulai bisnis sudah bukan rahasia lagi. Banyak peneliti yang telah menyarankan bahwa pembatasan aliran modal menghambat laju pertumbuhan pembentukan bisnis (Di Patti dan Dell'Ariceia, 2004; Blanchflower dan Oswald, 1998; Holtz- Eakin, et al, 1994).

Ada juga studi yang menyatakan bahwa ketersediaan sumber daya keuangan, khususnya modal ventura, sangat penting untuk pengembangan kewirausahaan (Henderson, 2002; Gompers & Lerner, 2001). Kebebasan investasi memberikan lahan subur bagi penciptaan berbagai instrumen dan mekanisme yang membiayai kewirausahaan, membuka jalan bagi investasi

di dalam dan di luar negeri.

III. METODE PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur bagaimana kualitas kelembagaan, FDI, dan interaksi di pasar (kebebasan pasar) mempengaruhi kewirausahaan (penciptaan bisnis) dan untuk membandingkan bagaimana perilaku variabel-variabel ini berubah di antara negara-negara yang menjadi objek penelitian, yakni 5 negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura, dan Thailand

Model yang dibangun adalah:

$$KWit = \alpha + \beta_1 KLit + \beta_2 ILit + \beta_3 PBit$$

Dengan, KWit menunjukkan ukuran kewirausahaan di negara i pada tahun t. KLit menunjukkan kualitas kelembagaan di negara i pada tahun t. ILit adalah infestasi asing langsung di negara i pada tahun t. Sedangkan PBit adalah indikator kebebasan pasar di negara i pada tahun t. Hipotesis ketiga faktor tersebut adalah berpengaruh positif terhadap kewirausahaan.

Variabel kewirausahaan didekati secara ekologi dengan tingkat penciptaan bisnis berdasarkan jumlah perusahaan yang baru dibangun (Klapper dan Love, 2010; Verheul, 2009; Klapper et al, 2006; Bartelsman et al, 2004; serta Armington dan Acs, 2002. Selanjutnya, studi ini menggunakan *density entry* (tingkat masuknya perusahaan baru) yaitu jumlah perusahaan baru yang terdaftar oleh setiap

1.000 orang usia kerja (usia 15 sampai 64 tahun). Data berasal dari Bank Dunia (*World Bank Entrepreneurship Snapshots*).

Variabel kualitas kelembagaan menggunakan versi terbaru dari *Worldwide Governance Indicators, 2014 Update* (www.goveindicators.org).

Indikator ini tersedia untuk 212 negara dan mencatat enam dimensi kualitas kelembagaan, yaitu: *Voice and Accountability, Political Stability and Absence of Violence/Terrorism, Government Effectiveness, Regulatory Quality, Rule of Law*, dan *Control of Corruption*. Skala setiap indikator berkisar antara -2,5 dan 2,5. Nilai tertinggi akan menunjukkan kualitas kelembagaan yang lebih baik untuk setiap faktor dan semakin berdampak positif terhadap kewirausahaan. Penggunaan rata-rata untuk mengukur pengaruh kelembagaan kewirausahaan telah diadopsi oleh McMullen et al (2008), Van Stel, et al (2007), dan Wennekers, et al (2005).

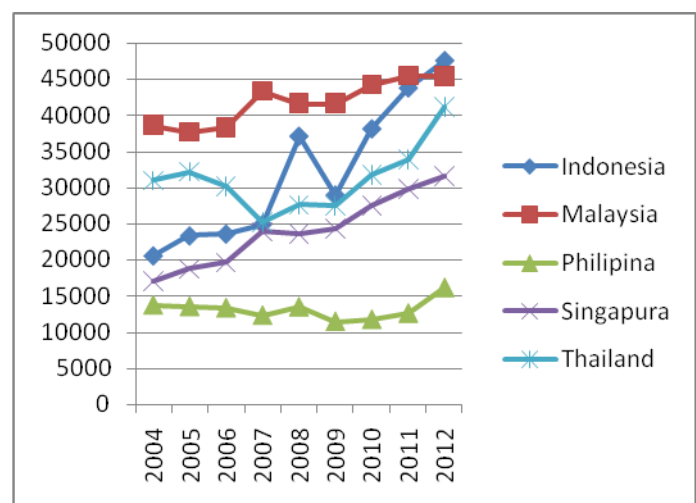
Tidak ada metode dan pengukuran yang diterima secara umum untuk variable investasi asing langsung (FDI) dan kebebasan pasar. Untuk itu, studi ini menggunakan ukuran FDI sebagai aliran bersih investasi asing dibagi dengan produk domestik bruto, dengan data dari *World Development Indicators* yang disusun oleh *World Bank*.

Variabel kebebasan pasar menggunakan *Index of Economic Freedom*

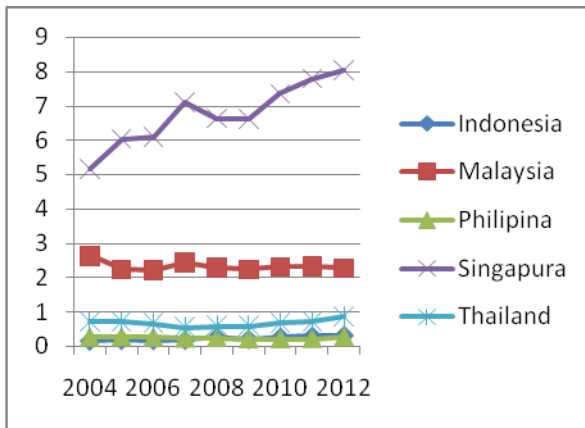
(IEF) dari Heritage Foundation (Beach dan Kane, 2007). Indeks ini menawarkan indikator independen terkait dengan kategori yang berbeda yang berkaitan dengan pasar bebas.

Indikator yang digunakan adalah: kebebasan untuk mendirikan perusahaan (*Business Freedom*); kebebasan untuk perdagangan internasional (*Trade Freedom*) dan kebebasan fiskal (*Fiscal Freedom*). Indikator-indikator ini dirancang sedemikian rupa sehingga bersama-sama untuk mengukur aspek utama dari kebebasan pasar di suatu negara dengan mengacu pada bagaimana pemain merespon perubahan kondisi pasar. Penelitian lain yang menggunakan metodologi IEF ini adalah Aidis, et al (2010), Claessens dan Laeven (2003), Haan dan Sturm (2000), Klapper, et al (2006), dan McMullen et al. (2008).

Selanjutnya, model linear yang dibangun, dianalisis dengan metode *ordinary least square* (OLS) menggunakan Eviews 7.



Gambar 1. Perusahaan Baru 2004-2009



Gambar 2. Perusahaan Baru per 1.000 Orang Usia Kerja

Tabel 1. Hasil Estimasi Kewirausahaan di Lima Negara

Negara	Hasil Estimasi
Indonesia	$KW = -0.70 + 0.17 KL + 0.01 IA + 0.01 PB$ (-3.15) (3.56) (1.05) (4.78) $R^2 = 0.9111$ $DW = 2.0942$ $Adj. R^2 = 0.878$
Malaysia	$KW = 4.40 + 0.05 KL + 0.01 IA - 0.03 PB$ (3.29) (0.08) (0.26) (-1.41) $R^2 = 0.2730$ $DW = 1.9570$ $Adj. R^2 = 0.0004$
Philipina	$KW = 0.10 + 0.15 KL + 0.01 IA + 0.01 PB$ (0.44) (1.73) (0.59) (0.96) $R^2 = 0.5193$ $DW = 1.7937$ $Adj. R^2 = 0.3389$
Singapura	$KW = 28.78 + 14.71 KL + 0.08 IA - 0.52 PB$ (0.91) (2.72) (2.04) (-1.52) $R^2 = 0.6699$ $DW = 2.3094$ $Adj. R^2 = 0.5461$
Thailand	$KW = 11.62 + 0.09 KL - 0.00 IA - 0.18 PB$ (1.87) (0.62) (-0.01) (-1.74) $R^2 = 0.4815$ $DW = 1.5530$ $Adj. R^2 = 0.2874$

IV. PEMBAHASAN

4.1. Perkembangan Kewirausahaan

Gambar 1 dan 2 menunjukkan perbandingan perkembangan kewirausahaan (*business creation*) di 5 negara ASEAN sejak 2004 hingga 2012. Berdasarkan jumlah perusahaan baru yang terdaftar selama satu tahun, Malaysia, Indonesia, dan Thailand lebih banyak. Akan tetapi, bila diamati lebih dalam, yakni dilihat dari densitas entry, maka Singapura jauh melebihi negara-negara lain. Hal ini berarti bahwa, Malaysia, Indonesia, Thailand, dan apalagi Philipina harus berupaya keras untuk menumbuhkan kewirausahaan di negara masing-masing.

Berdasarkan hasil estimasi OLS diperoleh kesimpulan bahwa, di kelima negara, hubungan antara kewirausahaan dan kekuatan kelembagaan adalah positif dan signifikan di Indonesia, Philipina, dan Singapura. Dengan demikian, untuk meningkatkan kewirausahaan adalah dengan menjaga dan memperbaiki kualitas kelembagaan. Terdapat hubungan dan pengaruh positif antara keberadaan perlindungan hak milik, kualitas pelayanan hukum, penegakan hukum, dan pengendalian korupsi terhadap wirausahawan.

Investasi asing langsung (FDI) berpengaruh positif di semua negara kecuali di Thailand, meskipun secara statistik pengaruh yang signifikan hanya terjadi di Singapura.

Kebebasan pasar berdampak positif terhadap pertumbuhan kewirausahaan di Indonesia dan Philipina. Bahkan di Indonesia, kebebasan pasar berpengaruh signifikan secara statistik terhadap kewirausahaan.

Model yang digunakan untuk menjelaskan kewirausahaan dengan variable kekuatan kelembagaan, FDI, dan kebebasan pasar, adalah sangat baik untuk Indonesia, Singapura, dan Philipina. Lebih dari 50 persen bisa menjelaskan permasalahan. Di Indonesia, bahkan hanya 9 persen yang dijelaskan oleh faktor lain.

Kelemahan studi ini adalah keterbatasan data, sehingga jumlah observasi menjadi kurang ideal. Studi selanjutnya diharapkan bisa menggunakan lebih banyak observasi sehingga bisa lebih baik.

V. KESIMPULAN

Studi ini dilakukan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penciptaan bisnis (atau kewirausahaan), khususnya di negara-negara ASEAN. Temuan menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara kualitas kelembagaan dan kewirausahaan.

Investasi asing langsung (FDI) juga sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap penciptaan bisnis di suatu negara. Sementara itu, pengaruh kebebasan pasar terhadap kewirausahaan ditemukan dalam studi ini justru berarah negatif.

Secara modeling, pemilihan tiga variabel untuk menjelaskan kewirausahaan sudah cukup baik. Penelitian selanjutnya bisa dilakukan di negara lain dengan jumlah observasi yang lebih banyak.

REFERENSI

- Aidis, R., Estrin, S., dan Mickiewicz, T., 2008, "Institutions and Entrepreneurship Development in Russia: A Comparative Perspective", *Journal of Business Venturing*, 23, hal. 656–72.
- Aidis, R. dan Adachi, Y., 2007, "Russia: Firm entry and Survival Barriers", *Economic Systems*, 31(4), hal. 391–411.
- Aidis, R., Estrin, S., dan Mickiewicz, T., 2008, "Institutions and Entrepreneurship Development
- Aidis, R., Estrin, S., dan Mickiewicz, T., 2010, "Size Matters: Entrepreneurial Entry and Government, Small Business Economics", 1–21 (diunduh pada 29 September 2014 dari: <http://www.springerlink.com/content/t8034l00p0vt0030/fulltext.pdf>)
- Aidis, R., dan Mickiewicz, T., 2006, "Entrepreneurs, Expectations and Business Expansion: Lessons from Lithuania". *Europe Asia Studies*, 58(6), hal. 855–80.
- Aidt, T., 2009, "Corruption, Institutions and Economic Development", Oxford

- Review of Economic Policy*, 25(2), hal. 271–91.
- Aitken, B. dan Harrison, A., 1999, “Do Domestic Firms Benefit from Direct Foreign Investment? Evidence from Venezuela”, *American Economic Review*, 89(3), hal. 605–18.
- Alfaro, L., dan Charlton, A., 2008, “International Financial Integration and Entrepreneurial Firm Activity”, *Harvard Business School Working Paper*, 07-012.
- Alfaro, L., Kalemli-Ozcan, S., dan Sayek, S., 2009, “FDI, Productivity and Financial Development”, *World Economy*, 32(1), hal. 111–35.
- Armington, C., dan Acs, Z., 2002, “The Determinants of Regional Variation in New Firm Formation”, *Regional Studies*, 36(1), hal. 33–45.
- Audrestsch, D. dan Fritsch, M., 1994, “On the Measurement of Entry Rates”, *Empirica*, 36, hal. 105–13.
- Ayyagari, M. dan Kosova, R., 2010, “Does FDI Facilitate Domestic Entry? Evidence from the Czech Republic”, *Review of International Economics*, 18(1), hal. 14–29.
- Barbosa, N. dan Eiriz, V., 2009, “The Role of Inward Foreign Direct Investment on Entrepreneurship”, *International Entrepreneurship and Management Journal*, 5, hal. 319–39.
- Barkhatova, N., 2000, “Russian Small Business, Authorities and the State”, *Europe–Asia Studies*, 52, hal. 657–76.
- Bartlett, C. dan Ghoshal, S., 1999, *Transnational Management: Text, Cases and Readings in Cross Border Management*, McGraw-Hill, New York.
- Bartelsman, E., Haltiwanger, J., dan Scarpetta, S., 2004. “Microeconomic Evidence of Creative Destruction in Industrial and Developing Countries”, *The World Bank Policy Research Working Paper*, 3464.
- Beach, W., dan Kane, T., 2007, “Methodology: Measuring the 10 Economic Freedoms” dalam: T. Miller, K. Holmes, M. O’Grady, dan A. Kim (Eds.), 2008, *Index of Economic Freedom: The Link between Economic Opportunity and Prosperity*, Washington: The Heritage Foundation, hal. 39–55.
- Blanchflower, D. dan Oswald, A., 1998, “What Makes an Entrepreneur?”, *Journal of Labor Economics*, 16(1), hal. 26–60
- Broberg, J., McKelvie, A., Short, J., Ketchen, D., dan Wan, W., 2013, “Political Institutional Structure, Influences on Innovative Activity”, *Journal of Business Research*, 66(12), hal. 2574–80.

- Claessens, S. dan Laeven, L., 2003, "Financial Development, Property Rights, and Growth", *Journal of Finance*, 58(6), hal. 2401–36.
- Cullen, J. dan Gordon, R., 2002, "Taxes and Entrepreneurial Activity: Theory and Evidence for the U.S.", *NBER Working Paper*, 9015.
- De Backer, K. dan Sleuwaegen, L., 2003, "Does Foreign Direct Investment Crowd Out Domestic Entrepreneurship?", *Review of Industrial Organization*, 22(1), hal. 67–84.
- Demirgüç-Kunt, A. dan Maksimovic, V., 1998, "Law, Finance, and Firm Growth", *The Journal of Finance*, 53(6), hal. 2107–37.
- Desai, M., Gompers, P., dan Lerner, J., 2003, "Institutions, Capital Constraints and Entrepreneurial Firm Dynamics: Evidence from Europe", *NBER Working Paper*, 10165.
- Di Patti, E. dan Dell'Ariccia, G., 2004, "Bank Competition and Firm Creation", *Journal of Money, Credit, and Banking*, 36(2), hal. 225–51.
- DiTella, R. dan McCulloch, R., 2006, "Why doesn't Capitalism Flow to Poor Countries?", *NBER Working Paper*, 13164.
- Djankov, S., Glaeser, E., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., dan Shleifer, A., 2003, "The New Comparative Economics", *Journal of Comparative Economics*, 31(4), hal. 595–619.
- Djankov, S., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., dan Shleifer, A., 2002, "The Regulation of Entry", *Quarterly Journal of Economics*, 117, hal. 1–35.
- Feldstein, M. dan Slemrod, J., 1980, "Personal Taxation, Portfolio Choice, and the Effect of the Corporate Income Tax", *Journal of Political Economy*, 88, hal. 854–66.
- Gentry, W. dan Hubbard, R., 2000, "Tax Policy and Entrepreneurial Entry", *American Economic Review*, 90, hal. 283–87.
- Glaeser, E., Scheinkman, J., dan Shleifer, A., 2003, "Injustice of Inequality", *Journal of Monetary Economics*, 50, hal. 199–222.
- Glaeser, E. dan Shleifer, A., 2003, "The Rise of the Regulatory State", *Journal of Economic Literature*, 41(2), hal. 401–25.
- Gordon, R., 1998, "Can High Personal Tax Rates Encourage Entrepreneurial Activity?", *IMF Staff Papers*, 45(1), hal. 49–60.
- Gomez-Casseres, B., 1997, "Alliance Strategies of Small Firms", *Small Business Economics*, 9, hal. 33–44.
- Gompers, P. dan Lerner, J., 2001, "The Venture Capital Revolution", *Journal of Economic Perspectives*, 15(2), hal. 145–68.

- Görg, H. dan Strobl, E., 2002, "Multinational Companies and Indigenous Development: An Empirical Analysis", *European Economic Review*, 46, hal. 1305–22.
- Haan, J., dan Sturm, J., 2000, "On the Relationship between Economic Freedom and Economic Growth", *European Journal of Political Economy*, 16, hal. 215–41.
- Henderson, J., 2002, "Building the Rural Economy with High-Growth Entrepreneurs", *Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Review*, 87(3), hal. 45–70.
- Herrera-Echeverri, H., Haar, J., dan Esteves-Breton, J.B., 2014, "Foreign Direct Investment, Institutional Quality, Economic Freedom and Entrepreneurship in Emerging Markets", *Journal of Business Research*, 67, hal. 1921-32.
- Hodler, R., 2009, "Industrial Policy in an Imperfect World", *Journal of Development Economics*, 90, hal. 85–93.
- Holtz-Eakin, D., Joulfaian, D., dan Rosen, H., 1994, "Sticking It Out: Entrepreneurial Survival and Liquidity Constraints", *The Journal of Political Economy*, 102(1), hal. 53–75.
- Kanbur, R., 1980, "Risk Taking and Taxation: An Alternative Perspective", *Journal of Public Economics*, 15(2), hal. 163–84.
- Kirzner, L., 1992, *The Meaning of Market Process: Essays in the Development of Modern Austrian Economics*, London: Routledge.
- Klapper, L., Laeven, L., dan Rajan, R., 2006, "Entry Regulation as a Barrier to Entrepreneurship", *Journal of Financial Economics*, 82, hal. 591–652.
- Klapper, L., dan Love, I., 2010, "The impact of the Financial Crisis on New Firm Registration", *World Bank Policy Research Working Paper*, 5444.
- Konings, J., 2001, "The Effects of Foreign Direct Investment on Domestic Firms: Evidence from Firm Level Panel Data in Emerging Economies", *Economics of Transition*, 9(3), hal. 619-33.
- Krueger, A., 1974, "The Political Economy of the Rent-Seeking Society", *American Economic Review*, 64(3), hal. 291–303.
- La Porta, R., Lopez-De-Silanes, F., Shleifer, A., dan Vishny, R., 1997, "Legal Determinants of External Finance", *The Journal of Finance*, 52(3), hal. 1131–50

- Malau, Andri, 2010, "WEF: Indonesia Ungguli China dan Rusia", dalam <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/11/03/11024747/WEF:.Indonesia.Ungguli.China.dan.Rusia>, diunduh pada 1 Oktober 2014.
- Mauro, P., 1995, "Corruption and Growth", *The Quarterly Journal of Economics*, 110(3), hal. 681–712.
- McMullen, J., Bagby, D., dan Palich, L., 2008, "Economic Freedom and the Motivation to Engage in Entrepreneurial Action", *Entrepreneurship: Theory and Practice*, 32(5), hal. 875–95.
- Okoroafo, S., 1993, "Firm Performance in a Liberalized Environment: Empirical Evidence from a Developing Country", *Journal of Business Research*, 28(3), hal. 175–189.
- Parker, S., 2007, "Law and the Economics of Entrepreneurship", *Comparative Labor Law and Policy Journal*, 28, hal. 695–716.
- Schumpeter, J. A., 1939, *Business Cycles: A Theoretical, Historical, and Statistical Analysis of the Capitalist Process*, McGraw-Hill Book Company Inc., New York
- Shleifer, A. dan Vishny, R., 1998, *The Grabbing Hand: Government Pathologies and Their Cures*, Harvard University Press, Cambridge.
- Sobel, R., 2008, "Testing Baumol: Institutional Quality and the Productivity of Entrepreneurship", *Journal of Business Venturing*, 23, hal. 641–55.
- Sobel, R., Clark, J., dan Lee, D., 2007, "Freedom, Barriers to Entry, Entrepreneurship and Economic Progress", *The Austrian Review of Economics*, 20, hal. 221–36.
- Stigler, G., 1971, "The Theory of Economic Regulation", *Bell Journal of Economics*, 2(1), hal. 3–21.
- Svensson, J., 1998, "Investment, Property Rights and Political Instability: Theory and Evidence", *European Economic Review*, 42, hal. 1317–41.
- Van Stel, A., Storey, D., dan Thurik, R., 2007, "The Effect of Business Regulations on Nascent and Young Business Entrepreneurship", *Small Business Economics*, 28, hal. 171–186.
- Vargas-Hernández, José G., 2013, "Strategies for Creating New Business, a Sociocultural and Institutional Approach", *Equilibrium Quarterly Journal of Economics and Economic Policy*, 8(1), hal. 81-90.
- Verheul, I., 2009, "Regional Opportunities and Policy Initiatives for New Venture Creation", *International Small Business Journal*, 27(5), hal. 608–25.
- Vernon, R., 1970, "Organization as a Scale Factor in the Growth of Firms", dalam *Proceeding FMI 6 Medan*

- Ribeiro, D. dan Roig, S. (Eds.), 2009, "Linking Globalization of Entrepreneurship in Small Oorganizations", *Small Business Economics*, 32, hal.233–39.
- White, C. dan Fan, M., 2006, *Risk and Foreign Direct Investment*, Palgrave Macmillan: Hampshire.
- World Bank, 2005, *Doing business in 2005: Removing obstacles to growth*, World Bank, Washington DC.
- Zimmerer, Th. W. dan Scarborough, N. M., 1996, *Enterpreneurship and The New Venture Formation*, Prentice Hall International, New York, USA.
- Zhou, D. dan Vertinsky, I., 2002, "Can Protectionist Trade Measures Make a Country Better Off? A Study of VERs and Minimum Quality Standards", *Journal of Business Research*, 55(3), hal. 227–36.
- Biodata Penulis**
Sugeng Hariadi, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dari Jurusan IESP, Fakultas Ekonomi, Universitas Airlangga, Surabaya pada 1991. Memperoleh gelar Magister Sains (MSi) dari Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada 1999. Gelar Doktor diperoleh dari Program Doktor Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada 2011. Saat ini menjadi dosen di Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Surabaya (Ubaya), Surabaya.